Mendorong Bitung Sebagai Pusat Ekspor-Impor Wilayah Timur Indonesia

Image not found or type unknown

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Mendorong Bitung Sebagai Pusat Ekspor-ImporWilayah Timur Indonesia

Bitung, 25 Februari 2016

Bitung merupakan satu dari dua pelabuhan simpul laut internasional (International Hub Seaport, IHP) berdasarkan Peraturan Presiden nomor 26 tahun 2012 tentang Cetak Biru Kebijakan Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas). “Oleh sebab itu pemerintah ingin mempercepat realisasi Bitung sebagai simpul kegiatan ekspor produk di wilayah Indonesia Timur,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat melakukan kunjungan kerja ke pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara, Kamis (25/2).

Dalam kesempatan ini, Darmin menegaskan pentingnya mendorong Bitung sebagai pintu keluar-masuk ekspor maupun impor karena letak Bitung yang berada di jalur lalu lintas perniagaan perairan Samudera Pasifik. Sementara pelabuhan simpul lainnya, berada di Kuala Tanjung, Sumatera Utara sebagai pintu keluar-masuk untuk perairan Samudera Atlantik.

“Sebagai negara kepulauan kita punya fleksibilitas sangat tinggi untuk menentukan di mana pintu masuk dan keluar kita terhadap negara-negara lain,” imbuh Darmin. Dari pintu-pintu masuk itulah, dilakukan transshipment, atau mengirim barang-barang tersebut ke wilayah-wilayah lain di Indonesia.

Wilayah cakupan geoekonomi Bitung, nantinya akan meliputi seluruh Sulawesi, Maluku, Papua Barat, Papua, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, serta menjadi pelabuhan singgah bagi pelaksanaan kerjasama sub-regional ASEAN (Indonesia, Filipina, Brunei Darusallam dan Malaysia). Saat ini, aktivitas ekspor masih lebih banyak dilakukan melalui pelabuhan di Jakarta dan Surabaya karena masih ada beberapa kendala yang perlu diselesaikan di Bitung.

Letak Pelabuhan, KEK dan Jalan Tol

Salah satu kendala yang harus segera diputuskan oleh pemerintah untuk mendorong percepatan pengembangan Bitung sebagai IHP adalah letak pelabuhan. Selain mengembangkan pelabuhan di tempat yang sudah ada sekarang (existing) dengan kendala lokasi yang terbatas, ada pilihan lain yaitu pelabuhan dipindahkan di lokasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau dipindahkan ke Pulau Lembeh yang tak jauh dari lokasi sekarang. Hal ini perlu disepakati bersama antara Menteri Perhubungan, Dewan KEK dan Pemerintah Daerah setempat.

Pemerintah menargetkan, pada tahun 2023 KEK Bitung akan beroperasi dengan volume output 1, 458 juta ton dalam wujud produk perikanan, pengolahan kelapa, produk farmasi dan produk-produk daerah lainnya.

Adapun wilayah KEK, saat ini pemerintah baru berhasil membebaskan 92,96 ha dan masih akan membebaskan sekitar 441 ha lagi. Selain itu, pemerintah juga akan membebaskan kawasan industri farmasi seluas 100 ha.

Dukungan lain dari pemerintah adalah pembangunan infrastruktur jalan tol dari Manado ke Bitung untuk memperlancar arus transportasi. Pembebasan lahan seksi I jalan tol sepanjang 14 km sudah dilakukan dan ditargetkan beroperasi Januari 2018. Sementara pembebasan lahan seksi II jalan tol dari km14-km39, saat ini masih dalam proses.

Pengembangan Bitung sebagai pelabuhan impor melibatkan dukungan berbagai kementrian, mulai dari Kementrian Kelautan dan Perikanan, Kementrian Perindutrian, Kementrian Perdagangan, Kementrian Perhubungan, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Dalam Negeri, Kementrian KUKM, Kementrian Keuangan serta koordinasi pelaksanaan dan pengawasan dari Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian.

Humas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian